

**MENYEMAI DEMOKRASI PADA MAHASISWA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
(STUDI ATAS PEMBELAJARAN CIVIC EDUCATION DI IAIN SURAKARTA)**

Muhammad Munadi

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

munadimahdiputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki respon siswa dari tugas yang dilakukan di luar kelas. Tanggapan itu diungkapkan melalui cara siswa menyampaikan aspirasi mereka di lembaga publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Sampel penelitian adalah 34 siswa Departemen Pendidikan Islam (PAI) yang menghadiri kelas Pendidikan Kewarganegaraan. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, observasi dan analisis dokumen. Peneliti menggunakan analisis statistik dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penugasan yang dilakukan di luar kelas melalui penyampaian aspirasi di lembaga publik ditanggapi rata-rata 3,4, wawancara kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam perjuangan demokrasi adalah rata-rata dari 3.2, dan pengamatan terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam perjuangan demokrasi rata-rata 3,02. Secara kualitatif: penyampaian aspirasi tentang masalah regional, masalah terjadi di sekitar lingkungan siswa, dilakukan melalui media cetak dengan mengirimkan layanan pesan singkat ke surat kabar Solopos dan Radio FM swasta.

Kata kunci: *Demokrasi; Pendidikan tinggi keagamaan Islam; Pendidikan kewarganegaraan*

Abstract

This study aims at investigating students' responses of the assignments done outside the classroom. The responses were revealed through the way the students deliver their aspiration in a public institution. This study employs both quantitative and qualitative methods. The samples of the study are 34 students of Islamic Education Department (PAI) who attend Civic Education class. The data were collected using questionnaire, observation and document analysis. The researcher used statistical and qualitative analysis. The results of the study show that: the assignments done outside the classroom through the delivery of the aspiration in the public institutions are responded on the average of 3.4, the interviews to the people who are directly involved in the democracy struggle is on the average of 3.2, and the observation to the people who are directly involved in the democracy struggle is on the average of 3.02. Qualitatively: the delivery of aspiration about the regional problems, the problems occurred around the students' neighborhood, were done through print media by sending short message service to Solopos newspaper and private FM Radio.

Kata kunci: *democracy; Islamic higher education; civic education*

Pendahuluan

Jatuhnya orde baru dipercaya mengubah segalanya, begitulah banyak asumsi para pengamat politik. Tetapi ternyata asumsi itu tidak selamanya benar, karena banyak perangkat yang belum siap - baik *soft-ware*, *hard-ware* maupun *brain-ware*. Keadaan ini justru banyak dimanfaatkan para elit politik dalam mempertahankan kedudukan dan kekuasaannya atau menggeser orang lain

melalui mobilisasi massa. Disinilah diperlukan wahana proses panjang melalui pendidikan.

Pendidikan yang menyadarkan bibit demokratisasi diantaranya melalui Civic Education di IAIN Surakarta. Perguruan tinggi ini memiliki jaringan mahasiswa yang langsung bersinggungan dengan masyarakat bawah dalam kegiatan *ansich* keagamaan maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Posisi strategis semacam inilah diharapkan

masyarakat, melalui mahasiswa, bisa berkembang menjadi publik yang memiliki *civic culture*.

Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan kan peran warga dalam masyarakat demokratis.

Guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan memahami permasalahan yang ada. Dengan demikian civic education akan menghasilkan suatu pendidikan yang demokratis dengan melahirkan generasi masa depan yang cerdas, terbuka, mandiri dan demokratis. Dengan demikian diharapkan civic education dapat memberikan nilai-nilai demokrasi dengan tujuan : Pertama, Dapat memberikan sebuah gambaran mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari integral suatu bangsa dalam upaya mendukung terealisasinya proses transisi menuju demokrasi, dengan mengembangkan wacana demokrasi, penegakan HAM dan civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Menjadikan warga negara yang baik (*good citizen*) menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi keadaban, egaliter serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ketiga, Meningkatkan daya kritis masyarakat sipil. Keempat, Menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif dalam setiap kegiatan yang menunjang demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan civil society.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji pemaknaan tentang partisipasi masyarakat. Pemaknaan pertama, partisipasi masyarakat sebagai tujuan. Suci Handayani (2006:18) menyatakan partisipasi semacam ini akan membelenggu, mendistorsi dan menghilangkan hak warga negara untuk terlibat pro aktif dalam setiap kebijakan yang diambil. Pemaknaan yang kedua, partisipasi dimaknai

sebagai alat. Pemaknaan tersebut menurut Suci Handayani (2006:18) mengandung maksud bahwa setiap tindakan partisipasi menjadi sebuah keniscayaan. Pemaknaan pertama hanya menekankan pada aspek partisipasi formal atas masyarakat, sedangkan makna kedua mengandung maksud keterlibatan masyarakat harus pro aktif .

Lebih jauh definisi partisipasi menurut Davis and Newstrom Newstrom (1997) as *the mental and emotional involvement of a person in a group situation that encourages the individual to contribute to group goals and to share responsibility for them*. Partisipasi dimaksud menurut Owens (1995:189) meliputi energi mental dan emosi, kreativitas, dan berbagi tanggungjawab.

Pengertian yang lebih fokus dinyatakan Arimbi HP dan Mas Achmad Santoso yang dikutip Slamet Luwihono, dkk. (2006:vii) bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu cara melakukan interaksi kelompok non elit dan elit pengambilan keputusan. Yang dimaksud kelompok *non-elit* adalah kelompok yang selama ini tidak dikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan kelompok *elit* adalah kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan.

Partisipasi dikaitkan dengan dunia politik termasuk di dalamnya pendidikan, menurut Huntington (1994:7) berkaitan dengan aspek kegiatan warganegara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat publik, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat publik, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Sedangkan kegiatan yang tercakup dalam partisipasi menurut Uphoff dan Cohen yang dikutip Munandar Sulaiman (1998:138) meliputi : membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil (keuntungan), dan penilaian terhadap seluruh kegiatan. Gould (1993:80-81) mengatakan bahwa wilayah partisipasi pembuatan kebijakan meliputi penentuan tujuan bersama dan cara-cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Pemaknaan-pemaknaan di atas mengandung pengertian bahwa partisipasi masyarakat mensyaratkan beberapa hal berikut ini :

1. Kesadaran penuh kelompok *elit* atas interaksinya dengan kelompok *non elit*.
2. Kelompok *non elit* tidak merasa interaksinya dengan kelompok *elit* sebagai sebuah bentuk “belas kasihan”
3. Interaksi yang ada menjadikan kedua kelompok berpartisipasi aktif
4. Partisipasinya berawal dari penentuan tujuan bersama dan cara-cara mewujudkannya), pelaksanaan, memperoleh hasil (keuntungan), serta penilaian terhadap seluruh kegiatan atau program.
5. Interaksi kedua kelompok menghasilkan keputusan strategis di bidang pendidikan (formasi kepegawaian, pengembangan profesional staf, anggaran, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya serta kurikulum).

Partisipasi sebagai bentuk demokrasi setidaknya membutuhkan 3 hal utama, yaitu : Pertama, kesukarelaan dari masyarakat untuk menggerakkan demokrasi; kedua, ketrampilan masyarakat untuk bekerja dengan demokrasi; dan ketiga, arena yang terjamin untuk pelaksanaan demokrasi (Dadang Yulinatara, 2004:130). Tetapi dari ketiganya yang paling bisa mengembangkan kultur demokrasi adalah dibutuhkannya pelaku demokrasi yang memiliki kecakapan dua hal : kecakapan intelektual (kecakapan berfikir kritis), dan kecakapan partisipatoris (Ubaidilah, 2000:76). Dua kecakapan tersebut memiliki cakupan dalam ketiga domain, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Cakupan domain kognitif terletak pada kecakapan intelektual (berfikir kritis). Kecakapan berfikir kritis menurut Khoiron (1999:90-111) mempunyai beberapa unsur, yaitu : (1) kemampuan mendengar, (2) kemampuan mengidentifikasi dan mendiskripsikan persoalan, (3) kemampuan menganalisa, dan (4) kemampuan untuk melakukan suatu evaluasi isu-isu publik.

Kecakapan berfikir kritis bisa dimiliki oleh warganegara melalui berbagai tangga yang

bisa dilampai untuk mencapai kesadaran kritis yaitu :

Tangga 1 : Membangun keterlibatan masyarakat bawah dalam proses politik.

Tangga 2 : Observasi sistematis, dengan cara masyarakat diajak bersama-sama mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah yang dihadapi mereka.

Tangga 3 : Analisis Struktural

Tangga 4 : Menentukan tujuan

Tangga 5 : Menentukan strategi dan taktik

Tangga 6 : Aksi dan refleksi secara terus-menerus (Ubaidilah, 2000:76)

Cakupan dalam domain afektif dan psikomotor terletak pada kecakapan partisipatoris. Kecakapan berfikir kritis (kecakapan intelektual) harus ditindaklanjuti berupa kecakapan partisipatoris. Cakupan kecakapannya adalah :

1. Keahlian berinteraksi (komunikasi dan kerjasama antar warganegara), Keahlian ini meliputi :
 - a. Mendengarkan dengan penuh perhatian
 - b. Bertanya dengan efektif
 - c. Mengutarakan pikiran dan perasaan
 - d. Mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, dan kesepakatan.
2. Keahlian memantau isu publik, meliputi beberapa keahlian :
 - a. Meriset isu publik melalui studi pustaka (media massa, informasi elektronik, dan perpustakaan), hingga studi lapangan (observasi, wawancara, dan kuesioner).
 - b. Menghadiri pertemuan-pertemuan publik
 - c. Mengamati proses pengadilan dan mekanisme kerja sistem hukum
3. Keahlian mempengaruhi kebijakan publik, meliputi kecakapan:
 - a. Membuat petisi
 - b. Berbicara di depan umum
 - c. Bersaksi di depan badan-badan publik
 - d. Terlibat dalam kelompok advokasi ad-hoc
 - e. Membangun aliansi (Ubaidilah, 2000:76).

Pendapat yang hampir sama disampaikan The National Standard for Civics and Government (Branson, 1999: 15-16) bahwa warganegara harus memiliki 2 kecakapan utama, yaitu kecakapan Intelektual dan

kecakapan partisipatoris. Dua kecakapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kecakapan intelektual meliputi: Kemampuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, mengevaluasi posisi, mengambil sikap/posisi, dan membela posisi. Sedangkan kecakapan partisipatoris meliputi : kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan dengan bekerjasama dengan yang lain, memaparkan dengan gamblang suatu masalah yang penting sehingga membuatnya diketahui oleh para pembuat kebijakan dan keputusan, membangun koalisi, negoisasi kompromi dan mencari konsensus, serta mengelola konflik.

Kecakapan tersebut di atas perlu dikembangkan di seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyadari betapa pentingnya suara mereka dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan publik di daerahnya. Kekritisan yang akan terbangun bisa menjadikan demokrasi tidak sebatas pada unsur formalisme saja, tetapi juga menyangkut segala aspek, baik *soft-ware*, *hard-ware* dan *brain-ware* (pelaku demokrasi :elit maupun massa politik, perangkat legislasi demokrasi, dan perangkat pelaksana legislasi demokrasi). Hal ini menurut Agus Dwiyanto, dkk (2003:171) menjadi penting karena perhatian individu terhadap masalah-masalah publik saja tidak cukup karena hanya mencerminkan sisi kognitif saja, tetapi juga harus berlanjut pada dimensi afektif dan psikomotorik. Dimensi ini meliputi kehadiran secara fisik diikuti dengan keaktifan, berperan dan sumbangan dalam kegiatan secara kolektif dalam bentuk aliansi. Aliansi publik diidentifikasi Eep Saefullah Fattah (2000:270) mempunyai ciri memiliki kesadaran akan dirinya, hak-haknya, kepentingan-kepentingannya, memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingannya terakomodasi. Secara mudah dimaknai Coleman yang dikutip Azra (1999:64) sebagai *sense of political competence* (apa peranan seseorang dalam sistem politik). Pendapat serupa juga disampaikan Gould (1993:260) bahwa partisipasi pembuatan kebijakan ini ditandai

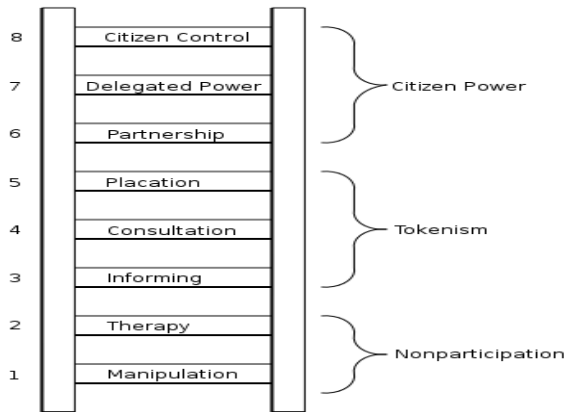
oleh keterlibatan langsung dan segera dalam proses pembuatan keputusan oleh orang-orang yang berkepentingan baik melalui partai politik maupun organisasi politik non partai.

Partisipasi menurut Miriam Budiharjo yang dikutip Fadillah Putra (2003:203) bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Namun dari paparan di atas bahwa partisipasi secara kolektif merupakan hal yang penting karena itu diperlukan aliansi karena dibentuk untuk melakukan agregasi kepentingan individu (Agus Dwiyanto, dkk.,2003:170). Partisipasi dalam kelompok masih terbagi menjadi dua yaitu dalam partai politik dan organisasi non partai politik. Namun seiring berjalannya globalisasi, menurut Giddens (2002:55) partai politik tergeser oleh gerakan sosial atau organisasi non pemerintah. Fenomena ini menurut Ulrich Beck yang dikutip Giddens (2002:55) disebut sebagai "sub politik". Pengertiannya adalah politik yang menjauhi parlemen dan menuju kelompok-kelompok dengan isu tunggal dalam masyarakat.

Kepentingan kelompok tersebut diantaranya diartikulasikan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik (Agus Dwiyanto, dkk.,2003:184-185), sehingga apa yang diinginkan publik melalui media tersebut dapat ditangkap dan diolah oleh eksekutif dan legislatif untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan publik. Pernyataan serupa juga disampaikan Emmy Hafild (2004:59) bahwa media bisa menjadi pusat penyebarluasan keputusan-keputusan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh DPRD; memberitakan proses-proses di DPRD; serta memberitakan posisi-posisi yang diambil pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan publik. Dua pendapat di atas terlihat jelas bahwa media sangat penting dalam upaya pengembangan kultur demokrasi dalam masyarakat, sehingga bisa menjadi pilar penentu berjalannya demokrasi.

Keseimbangan antar 3 komponen tersebut diperlukan tahapan yang panjang dalam masyarakat. Diantaranya melalui proses

partisipasi masyarakat yang berjalan bertahap. Pentahapan partisipasi ini disebut Sherry Arnstein (1969) serta Gaventa dan Valderama (2001: 23-24) sebagai *A Ladder of Citizen Participation* (tangga partisipasi warganegara). Tangga tersebut terdiri atas 8 tangga yang terbagi menjadi 3 tahapan. dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 2. Tangga Partisipasi

Gambar di atas dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkat. Tingkat yang paling rendah atau tidak ada partisipasi terletak pada tangga manipulasi dan therapy disebut sebagai tingkat tidak ada partisipasi (*nonparticipation*). Tangga penentraman, menginformasikan dan konsultasi merupakan tingkat “*tokenisme*”. Artinya masyarakat dilibatkan pada permukaan atau tindakan simbolis dalam pengambilan keputusan publik dan sekedarnya dilibatkan sebagai upaya dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan tingkat terakhir disebut kekuasaan oleh warga terletak pada tangga kemitraan, pendelegasian dan pengawasan oleh warga. Dari tangga tersebut yang paling besar partisipasinya (*most citizen participation*) terletak pada tangga pengawasan oleh warga.

Partisipasi menurut Cheng dan Cheung (1995:) dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

In a practical sense, through communicating effectively with the public, the policy makers can reduce the unnecessary disruption in the planning process and gain support for the resulting educational policy. Ethically, the policy makers will have provided chances for the

public to voice their opinions concerning educational policies which may have a far-reaching effect on them. Thus, the public will have at least participated through voicing out their views.

Maksud dari pendapat tersebut adalah partisipasi dibuat untuk memberikan kesempatan berkomunikasi secara efektif pada publik (menyampaikan opini-opininya tentang kebijakan pendidikan), menjadikan kebijakan pendidikan dapat mudah dan lancar dalam implementasinya. Bahkan justru dengan adanya ruang partisipasi menjadikan publik memberikan dukungan sejak awal baik dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu dikarenakan kebijakan berpengaruh besar terhadap kehidupannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya menyemai partisipasi mahasiswa dalam lembaga publik melalui mata kuliah civic education, respon mahasiswa atas tugas ke luar kelas melalui penyampaian aspirasi di lembaga publik dan bentuk serta media yang dipakai dalam penyampaian aspirasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penggabungan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Subyek penelitian adalah mahasiswa PAI yang mengikuti mata kuliah Civic Education berjumlah 34 orang. Metode pengumpulan data dengan memakai analisis dokumen (hasil rekaman audio, video, dan cetak penyampaian aspirasi) dan angket respon atas perkuliahan yang mengarahkan partisipasi dalam lembaga publik dan dokumen berupa rekaman penyampaian partisipasi baik melalui media cetak dan elektronik. Analisis Data dengan memakai statistik dan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian/Kajian

Untuk menyemai partisipasi dalam perkuliahan adalah hal yang tidak mudah. Hal itu disebabkan kebiasaan siswa dan mahasiswa sejak awal dikondisikan untuk sekedar sebagai penerima suapan dari guru/dosen. Model ini disebut Paulo Freire sebagai pendidikan gaya “bank”. Kebiasaan ini diupayakan diubah dengan memulai perubahan tujuan pembelajaran yang mengarahkan

mahasiswa memiliki kecakapan intelektual dan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab. Cirinya :

1. Memiliki kesadaran akan dirinya, hak-haknya, kepentingan-kepentingannya,
2. memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya,
3. memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingannya terakomodasi. Ukurannya pada:
 - a. Ada tidaknya kepekaan masyarakat di tempat itu terhadap penindasan
 - b. Membentuk mahasiswa yang berfikir komprehensif, analitis, dan kritis.
 - c. Mengembangkan kultur demokratis

Mendasarkan pada arah semacam ini perkuliahan bersifat *active learning* dan dosen sebagai *fasilitator*. Awal tatap muka mata kuliah ini menjadikan mahasiswa dan dosen harus membuat kontrak belajar yang demokratis di awal perkuliahan dengan disertai kesepakatan penugasan yang mengembangkan aksi partisipasi mahasiswa di lembaga publik. Kontrak belajar yang disepakati yaitu: komponen penilaian dan prosentasenya, toleransi jumlah ketidakhadiran dan maksimal dosen dan mahasiswa hadir di ruang kelas serta strategi dan metode pembelajarannya. Untuk aksi partisipasi mahasiswa di lembaga publik disepakati yaitu: mahasiswa mengikuti dan berperan serta pada acara penyampaian aspirasi di DPRD salah satu kabupaten/kota di Surakarta, mengutarakan aspirasi lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dan kunjungan ke lembaga yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kesepakatan Pembelajaran tidak hanya memerlukan metode dan pendekatan yang aktif tetapi perlu juga didukung materi yang mengarahkan partisipasi mahasiswa di lembaga publik. Materi Civic Education di IAIN Surakarta meliputi: Identitas Nasional, Negara dan Warganegara, Demokrasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Civil Society, Otonomi Daerah, dan Good Governance. Materi tersebut dikaitkan dengan konteks sumber ajaran Islam, yaitu al Qur'an dan Hadits. Selain itu dikontekskan dengan

kehidupan umat Islam. Gambaran materinya sebagai berikut:

Tabel 1. Materi Perkuliahan Civic Education

No	Materi	Konteks Islam
1.	Identitas Nasional	Surat Al Hujurat: 6 - 13, Al Mu'minin:53 dan Ar Rum:32
2.	Negara dan Warganegara	Surat Al Baqarah:126, Ibrahim:35 & 37, Saba':34-46, Al Isra':16, dan Al A'raf:96.
3.	Demokrasi	Surat Ali Imran:26, 159, Asy Syura:38, Al Baqarah:233, 247, Al Hasyr:7, dan An Nahl:71
4.	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia	Konstitusi Madinah dan <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>
5.	Civil Society	Kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar
6.	Otonomi Daerah	Modal sosial umat Islam dalam kehidupan bernegara
7.	Good Governance.	Kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar

Materi tersebut menunjukkan bahwa ada kesingkronan antara Islam dengan persoalan berbangsa dan bernegara. Hal ini dilakukan untuk memberi wawasan tambahan kepada mahasiswa bahwa Islam tidak anti demokrasi dan tidak anti perkembangan manusianya. Untuk meneguhkan identitas sebagai sebuah bangsa, mahasiswa diberikan tugas menghafal Al Qur'an surat al Hujurat ayat 6 – 13. Hafalan ini diwajibkan agar mahasiswa bisa menghayati jika ada suatu berita, maka perlu diperiksa kebenarannya secara teliti,

mendamaikan orang yang berperang atau berselisih, larangan menjelekkan kelompok satu dengan yang lainnya, saling curiga, berprasangka, dan harus saling mengenal antar manusia. Hafalannya juga diperkuat dengan menghafalkan Al Mu'minun: 53 dan Ar Rum: 32. Dua surat ini meneguhkan orang Islam agar tidak merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing) serta merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka sendiri.

Untuk membumikan materi terutama berkaitan pengembangan ketrampilan demokratis, mahasiswa dilatih mempraktekkan penyampaian aspirasi melalui lembaga publik dan mengamati kerja-kerja organisasi masyarakat sipil. Semua mahasiswa harus terlibat di semua tempat dan kegiatan yaitu:

Tabel 2. Tempat dan Kegiatan di Luar Kelas Civic Education

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			
		DPRD	LS M	Koran	Radio
1.	Penyampaian aspirasi Lisan	V	-	-	V
2.	Penyampaian aspirasi Tulisan	-	-	V	-
3.	Sharing Advokasi Masyarakat	-	V	-	-

Pada awal akan mempraktekkan kegiatan ini, mahasiswa banyak yang berasalan macam-macam. Ada yang mempunyai kekhawatiran kalau berkunjung ke gedung DPRD ditolak, ada yang menginginkan penyampaian aspirasinya melalui surat saja dan ada yang berpendapat perwakilan saja ketika menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Semua alasan itu berupaya dipatahkan oleh dosen pengampu, sehingga agak berat hati, mahasiswa akhirnya melampaui tugasnya dengan baik. Pada awalnya mahasiswa disetujui oleh pimpinan

DPRD untuk datang secara perwakilan saja. Hal ini dikonsultasikan ke dosen pengampu dengan jawaban sederhana, kalau tidak semua merasakan: Bagaimana yang lainnya? Dengan lobby yang alot akhirnya disetujui seluruh anggota kelas bisa masuk ke ruang sidang gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD seputar masalah-masalah yang terjadi di salah satu wilayah sesuai daerah yang dikunjungi DPRD-nya.

Setelah mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, mahasiswa juga dilatih untuk menyampaikan secara tertulis melalui media surat kabar. Mereka mengirimkan aspirasi lewat sms yang dipublikasikan secara cetak oleh Solo Pos. Hasil yang dipublikasikan diserahkan ke dosen pengampu. Selain itu mahasiswa harus menyampaikan aspirasi secara on-air di satu radio FM swasta. Penyampaian ini direkam sendiri oleh mahasiswa dan hasilnya diberikan kepada dosen pengampu. Bentuk dan media yang dipakai dalam penyampaian aspirasi melalui lisan dan tulisan. Penyampaian aspirasi melalui media cetak dengan mengirimkan pesan singkat atau *short message service* (sms) masalah-masalah daerah asal mahasiswa tinggal di salah satu koran di rubrik "kring Solo Pos". Yang disampaikan mahasiswa bervariasi tetapi yang paling banyak menyampaikan aspirasi tentang kondisi infrastuktur yang jelek asal daerah tempat tinggal mahasiswa. Penyampaian aspirasi lisan mahasiswa melalui salah satu Radio FM di Solo sesuai topik pembahasan yang sudah ditentukan oleh stasiun radio.

Untuk menambah wawasan tentang organisasi masyarakat sipil, mahasiswa juga melakukan kunjungan sekretariat LSM. Dengan kunjungan ini mahasiswa dilatih untuk bisa konsolidasi demokrasi dengan komponen selain Perguruan Tinggi. Yang dikunjungi mahasiswa diantaranya Yayasan Kakak, dan LSM lain di Solo Raya. Mahasiswa ketika berkunjung ke LSM banyak mendapatkan cara kerja lembaga dalam mengadvokasi masyarakat dalam masalah yang dihadapinya. Ketika berkunjung salah satu LSM, mahasiswa

menjadi paham cara kerja perencanaan pemerintahan yang bersifat *bottom up*. Perencanaan yang berawal dari musyawarah perencanaan pengembangan kelurahan (musrenbangkel) sampai dengan musyawarah perencanaan pengembangan kota (musrenbangkot).

Kunjungan dan penyampaian aspirasi direspon positif oleh mahasiswa. Tugas ke luar kelas melalui penyampaian aspirasi di lembaga publik direspon dengan rata-rata 3.4. Respon ini dilihat dari capaian maksimal 4, bermakna relatif tinggi. Capaian ini lebih rendah responnya ketika mahasiswa melakukan wawancara pada orang-orang yang terlibat langsung dalam upaya demokrasi dengan rerata 3.2. Lebih rendah capaiannya ketika mahasiswa melakukan pengamatan pada orang-orang yang terlibat langsung dalam upaya demokrasi reratanya hanya 3.02. dilihat dari kesemua data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa sangat antusias ketika kuliah praktek di luar kelas dengan mengaktualisasikan diri di luar lembaga pendidikan.

Kegiatan mahasiswa ini mirip dengan apa yang disampaikan de Asis yang dikutip Agus Dwiyanto (2003:190) bahwa partisipasi dapat dilakukan dengan empat cara. Pertama, menjamin kemampuan aktor dan stakeholder untuk memperoleh informasi dari pemerintah. Kedua, adanya transparansi dalam pemerintahan melalui pertemuan secara terbuka dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Ketiga, melaksanakan dengar pendapat dan membuat keputusan bersama pada rancangan, keputusan, peraturan dan hukum. Keempat, melibatkan warga negara untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.

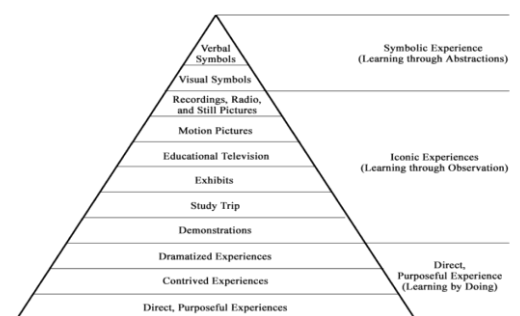
Persemaian partisipasi pada mahasiswa melalui media cetak maupun elektronik yang beredar di Solo, Solo Pos maupun Radio MQ FM, dalam menyalurkan ataupun memfasilitasi bagi warga untuk penyampaian aspirasi merupakan hal yang positif. Kondisi ini sesuai pendapat Habermas yang dikutip Boyd-Barret (1995, hal. 230) bahwa peran dukungan media merupakan bentuk forum ideal dalam

mengaspirasikan pendapat masyarakat. Pendapat tersebut lebih ditekankan lagi oleh Eko Prasetyo (2005:116) bahwa media bisa menjadi simpul kekuatan politik yang strategis khususnya dalam menjalankan kontrol, melakukan pengawasan sekaligus mengembangkan sayap kekuatan politik alternatif. Dengan demikian menunjukkan bahwa media bisa membantu proses penguatan partisipasi masyarakat.

Kecakapan yang sudah disemaikan kepada mahasiswa merupakan pengembangan *democratic skills* (Levine, 2006). Kecakapan ini mencakup kecakapan mendengarkan (*listening*), kecakapan berunding (*deliberating*), kecakapan mengorganisasikan (*organizing*) dan membuat petisi (*petitioning*). Kecakapan tersebut harus dimiliki oleh semua orang termasuk sangat penting dimiliki oleh kelompok profesi apapun karena tidak terbatas pada *civic engagement* setelah melaksanakan pekerjaan utama tetapi merupakan jantung dari kehidupan profesional mereka.

Diskusi

Pembelajaran yang langsung dipraktekkan oleh mahasiswa dalam mata kuliah Civic Education direspon positif. Hal ini lebih dikarenakan tipologi mata kuliah yang tidak bisa dilakukan hanya di ruang kelas dan nara sumber mata kuliah yang beragam. Ini mendasarkan pada gambar berikut:



(Lee and Reeves, 2007)

Berdasarkan pada teori piramida pengalaman Edgar Dale di atas, mahasiswa maupun siswa lebih mudah dalam mengingat mata kuliah/pelajaran yang diterima diperlukan banyak pengalaman langsung yang bermanfaat. Dengan pengalaman langsung menjadikan mahasiswa/siswa lebih lama mengingatnya.

Simpulan

Kunjungan dan penyampaian aspirasi direspon positif oleh mahasiswa. Tugas ke luar kelas melalui penyampaian aspirasi di lembaga publik direspon dengan rata-rata 3.4, Wawancara pada orang-orang yang terlibat langsung dalam upaya demokrasi dengan rerata 3.2, dan pengamatan pada orang-orang yang terlibat langsung dalam upaya demokrasi rerata 3.02.

Menyemai partisipasi memang tidak mudah tetapi dengan rencana tersengaja dan terus menerus akan tercipta sebuah generasi yang tahu akan hak-haknya dan berani menegaskan eksistensinya. Dengan demikian akan terwujud dan melembaga nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Investasi ini akan menjadikan sebuah negara yang kuat akan warganegara yang kritis dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam : Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Barber BR, Higgins RR, Smith JK, Ballou J, Dedrick J. n.d. 1992. *Civic Skills and Service Learning: Research in Democratic Theory and Practice*. New Brunswick, NJ:Walt Whitman Cent. Cult. Polit. Democr., Rutgers Univ..
- Boyd-Barret, Oliver. 1995. Conceptualizing the "public sphere" . in Boyd-Barret, Oliver. *Approaches to media a reader*. London: Arnold.
- Branson, Margaret S.,. 1999. *Belajar civic education dari Amerika*. Yogyakarta:LKIS dan TAF.
- Branson, Margaret S., *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network, 1998*
- Cheng, Yin Cheong, Cheung, Wing Ming,. 1995. "A framework for the analysis of educational policies" [electronic version] *The International Journal of Educational Management*. Vol. 9, Iss. 6; pg. 10, 12 pgs,
- Dadang Yuliantara, Dadang. 2000. *Arus bawah demokrasi : Otonomi dan pemberdayaan desa*, Yogyakarta : LAPERA.
- Davis, K., and Newstrom, J. W. 1997. *Human Behaviour at Work: Organizational behavior*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Dwiyanto, Agus., dkk.. 2003. *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta : PSKK UGM.
- Fatah, Eep Saefullah. 2000. *Zaman kesempatan*. Bandung : Mizan.
- Gaventa, John dan Valderama, Camila. 2001. *Mewujudkan partisipasi 21 teknik partisipasi masyarakat untuk abad 21*, Jakarta: The British Council.
- Giddens, Anthony. 2002. *The third way, jalan ketiga pembaruan demokrasi sosial*, Jakarta : GramediaPustaka Utama.
- Gould, Carol C. 1993. *Demokrasi ditinjau kembali* (terjemahan Samodra Wibawa), Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Hafild, Emmy. 2004. Media dan transparansi. Dalam Samsuri. *Media dan transparansi*. Jakarta: The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA).
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan.,. 1994. *Partisipasi politik di negara berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Khoiron, *Pendidikan politik bagi warganegara*, Yogyakarta : LkiS, 1999.
- Levine, Peter. 2006. *Democratic skills for professionals*, From: [www. Peter levine.ws/mt/archives/000830.html](http://www.peterlevine.ws/mt/archives/000830.html).
- Lee, S. J., & Reeves, T. C. (2007). Edgar Dale And The Cone Of Experience. <https://lidtfoundations.pressbooks.com/chapter/edgar-dale-and-the-cone-of-experience/>
- Munandar Soelaiman, M.,. 1998. *Dinamika masyarakat transisi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Owens, Robert G. 1995. *Organizational behavior in education*, Boston : Allyn and Bacon.

Pratikno, DPRD dan good governance Dalam Martinus Ujianto (editor). *Good governace: Untuk daulat siapa?*, Yogyakarta: Forum LSM DIY – Yappika, 2001.

Prasetyo, Eko. 2005. *Demokrasi tidak untuk rakyat*, Yogyakarta:Resist Book.

Putra, Fadillah. 2003. *Partai politik dan kebijakan publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Averroes Press.

Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan tidak untuk publik*, Yogyakarta : Resist Book.

Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of citizen participation* from [http://en.wikipedia.org/wiki/Participation_\(decision_making\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Participation_(decision_making)).

Slamet Luwihono, dkk.,. 2006. *Perencanaan dan penganggaran partisipatif untuk good governance*, Bandung: FPPM.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2007. Civic Education. <https://plato.stanford.edu/entries/civic-education/>, 2007.

Suci Handayani. 2006. *Pelibatan masyarakat marginal dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif (sebuah pengalaman di Kota Solo)*. Surakarta : KOMPIP Solo.

Ubaidillah, A., dkk.,. 2000. *Demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*, Jakarta : IAIN Press.